

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Strategi dan bentuk kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang sebagai elemen *civil society* pada penggusuran lahan pada pembangunan tol Jombang – Mojokerto.

Proyek Pembangunan Jalan Tol Jombang- Mojokerto merupakan proyek jalan yang dikerjakan oleh PT Marga Harjaya Insfraktruktur (MHI) pada tahun 2007 pembangunan jalan tol Jombang – Mojokerto terbagi menjadi 4 seksi dengan panjang 40,5 kilometer. Jalan Tol Jombang Mojokerto meskipun sudah beroperasi sejak tahun 2016 namun masih menyisakan polemik sampai saat ini, terutama pada seksi 1 dan seksi 2, proses pembebasan lahannya tidak mencerminkan asas- asas keadilan bagi masyarakat. Hal ini senada dengan yang di ungkapkan oleh saudara HJ. Khusaini salah satu korban pembangunan tol Jombang – Mojokerto :

“Jadi setelah sosialisasi tol Jombang – Mojokerto pemberkasan ternyata banyak di temukan kendala, masyarakat tidak dilibatkan mulai pengukuran itu diukur sendiri, warga tidak dilibatkan dalam penentuan kesepakatan harga mulai penentuan harga dan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk menentukan kriteria tanah, harga tanah, proses musyawarah P2t bukan layaknya orang mencari kesepakatan bersama dan saya sendiri itu punya sebidang tanah luas nya 559 Meter, saya gunakan buat usaha ayam potong mbak, tetapi usaha kandang saya dirobohkan secara paksa sebelum ada ganti rugi dan proses musyawarah yang dilakukan oleh BPN melalui P2T (Panitia Pengadaan Tanah), sejak saat itu perekonomian saya tersendat mbak sekarang “¹

¹ Khusaini, Wawancara. Kendal Sari 29 Juni 2017

Korban Jamaah pembangunan tol Jombang – Mojokerto mengadu ke Kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang beharap untuk segera menindak lanjuti tentang dampak kerugian masyarakat yang di rasakan dengan adanya pembangunan tol Jombang –Mojokerto tersebut.

Dari pihak Kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang menindaklanjuti laporan salah satu korban jamaah pembangunan tol (JKPT) karena melihat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada pembangunan tol Jombang –Mojokerto tersebut hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh saudara Charul Hakim Selaku koordinator kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang:

“Saya melihat bahwa peran pemerintah yang melakukan tindakan yang kami anggap tidak melihat unsur- unsur HAM pada warga masyarakat dalam pembangunan tol Jombang –Mojokerto dan banyak pembangunan di Jombang yang tidak melihat secara utuh hak masyarakat berdasarkan ekonomi, sosial dan budaya sebagai bagian dari hak asasi manusia dan saya melihat bahwa pembangunan tol Jombang – Mojokerto telah melakukan perampasan dan pemiskinan ekonomi, sosial dan budaya bagi warga terdampak dan masyarakat sekitar pembangunan tol mbak.²

Dari laporan-laporan itu kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang juga berupaya melakukan kordinasi dan membedah potensi-potensi yang muncul akibat pembangunan tol yang ada di Jombang, kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang menganalisa dan melakukan diskusi-diskusi tentang pembangunan di Jombang yang tidak melihat hak asasi masyarakat dan kearifan lokal terhadap korban pembangunan tol tersebut, tidak hanya laporan-laporan dari warga tentang ganti

² Charul Hakim, Wawancara, Mojongapit, 17 Juni 2017

rugi dan proses musyawarah yang tidak melihat hak rakyatnya. hal ini senada diungkapkan oleh khusaini salah satu korban tol :

“ Prosedur musyawarah p2t itu dalam pembangunan tol menyalahi aturan, kami sebagai orang awam tidak tahu proses p2t dalam penetapan harga, tiba –tiba digusur dan ganti rugi yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan ”³

Meskipun sudah ada mediasi antara pihak pemilik project tol namun tidak pernah memutuskan harga lahan, malah justru bermain untuk mendapat keuntungan politik. hal ini senada diungkapkan oleh charul hakim selaku koordinator kontras surabaya biro bantuan hukum Jombang :

”Banyak mediasi yang dilakukan antara warga dengan pemilik project, mediasi ini malah bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari pihak DPRD Jombang, DPRD Provinsi, BPN, PEMKAB Jombang, dan POLRES Jombang semuanya bermain dan berlomba menjadi pahlawan warga akan tetapi menikam dari belakang alias bermain-bermain sehingga sampai sekarang tidak ada kejelasan nasib warga korban tol Jombang – Mojokerto.

Dengan melihat fakta-fakta yang ada tentang dampak pembangunan tol Jombang- Mojokerto kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang memutuskan untuk membentuk organisasi dan perkumpulan yang kuat di Jombang, kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang mengundang seluruh elemen organisasi yang ada di Jombang, untuk melakukan dialog, diskusi, namun yang tertarik dan sukarela datang hanya 7 organisasi yaitu : Women Crisis Center Jombang, Gerakan Mahasiswa Persatuan Indonesia (GMPI) Jombang, LapeksdamNU, Himpunan Mahasiswa Islam Jombang (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI),

³ Khusaini, Wawancara. Kendal Sari 29 Juni 2017

Konsorsium Mahasiswa Jombang (KMJ), BEM UNDAR. Dan kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang.

Kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang melalui kesepakatan bersama dengan beberapa elemen organisasi yang datang tersebut untuk membentuk sebuah aliansi dari beberapa organisasi tersebut dengan sebutan GEMPAR (gerakan aliansi masyarakat peduli agraria) Jombang. Gempar melakukan diskusi tentang pembangunan – pembangunan yang di Jombang, bedah film, dan aksi. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh saudara Charul Hakim Selaku koordinator gempar (Gerakan Masyarakat Peduli Agraria) :

“Bagaimana data dan fakta kita kumpulkan, data dan fakta itu kita kumpulkan dengan pertama kita melakukan bedah film, dan pada waktu kita melihat lagi gencar – gencarnya isu semen Indonesia kendeng, melihat dari fenomena dari isu semen kendeng Indonesia, kemudian kita berdialektika tentang pembangunan-pembangunan di Jombang dan kita diskusi- diskusi menentukan perangkat aksi dan kita memutuskan untuk melakukan aksi.

Tidak hanya mebentuk aliansi gempar, upaya strategi dan bentuk Kontras Surabaya biro bantuan Hukum Jombang melakukan upaya pendampingan korban tol Jombang yaitu memberikan edukasi ke warga bagaimana menyampaikan tuntutan dan pendapat di muka umum contohnya seperti dengan melakukan dialog dan kajian – kajian dengan menganalisis pasal UU no 39 TAHUN 1999 tentang hak asasi manusia. (HAM). Hal ini senada diungkapkan oleh koordinator kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang:

“Kita memberikan diskusi ke warga -warga yang terdampak tol Jombang – Mojokerto mengenai hak politik, hak budaya, hak ekonomi bagaimana semestinya di

fasilitasi oleh negara contohnya seperti pak khusaini itu mbak salah satu korbanya, bagaimana hak ekonomi yang di peroleh pak khusaini, tanah pak kusaini itu mbak yang terkena itu tanah usaha kandang ayam, tapi diserobot oleh p2t dan tanahnya yang diserobot itu mbak di hargai tanah biasa padahal kan tanah usaha mbak, lah otomatis pak khusani merugi mbak, lah proses ini harus menjadi prioritas bahwa haknya telah di langgar oleh P2t tol Jombang – Mojokerto mbak, dan otomatis pak khusaini tidak mendapatkan jaminan yang baik, edukasi yang seperti ini kalau tidak dilakukan maka mereka tidak tahu hak- haknya ”⁴

Melakukan investigasi secara menyeluruh secara administrasi maupun non administrasi terhadap tahapan-tahapan dalam pembangunan tol Jombang –Mojokerto. Hal ini senada diungkapkan oleh koordinator biro bantuan hukum Jombang :

Hal ini senada diungkapkan oleh koordinator biro bantuan hukum Jombang :

“ Kita juga memastikan bahwa apakah UU no 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan teknisnya berdasarkan Perpres 71 tahun 2012, tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum apakah sudah di jalankan dengan terbuka dan akuntabel dan investigasi ini berkaitan dengan tentang pelaksanaan teknisnya, sudahkah di jalankan oleh benar oleh BPJT atau belum .⁵

Melaporkan hasil temuan investigasi kepada komnas HAM terkait pelanggaran HAM nya, melaporkan ke ombusment terkait pelanggaran administrasi instansi /lembaga Negara penyelenggara tol yaitu BPJT. Terakhir yaitu melakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Jombang komisi A dan komisi C bersama perwakilan yang terdampak pembangunan Jalan tol Jombang – Mojokerto yang di hadiri oleh perwakilan BBH Kontras wilayah Jombang, perwakilan warga yang terdampak tol Jombang -Mojokerto, perwakilan PT. MHI, perwakilan BAPPEDA,Kepala Dinas PU.

Kontras surabaya biro bantuan hukum Jombang yang menjadi bagian dari sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan – kebijakan penguasa tol yang deskriminatif serta memperjuangkan aspirasi masyarakat korban tol yang tertindas . Apabila dihadapkan dengan teori strategi pelapisan dari flowler, maka Kontras

⁴ Charul Hakim, Wawancara, Mojongapit, 17 Juni 2017

⁵ Charul Hakim, Wawancara, Mojongapit, 17 Juni 2017

Surabaya biro bantuan hukum Jombang di sini dapat dikatakan bahwa kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang berhasil menggalang kekuatan dengan bekerja sama dengan seluruh elemen organisasi yang ada di Jombang serta mampu menyatukanya di dalam sebuah gerakan yaitu gerakan masyarakat peduli agraria Jombang (GEMPAR) yang terdiri dari Women Crisis Center Jombang, Gerakan Mahasiswa Persatuan Indonesia (GMPI) Jombang, LapeksdamNU, Himpunan Mahasiswa Islam Jombang (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI), Korsorsium Mahasiswa Jombang (KMJ), BEM UNDAR dengan melakukan aksi untuk mendesak pemerintah bahwa ada hak- hak masyarakat yang harus di selamatkan pada pembangunan tol Jombang – Mojokerto yang sampai sekarang masih menyisakan polemik dan kerugian terutama pada korban jamaah pembangunan tol Jombang – Mojokerto .

Dalam konsep *civil society* yang di jelaskan oleh As hikam Kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang adalah salah satu elemen *civil society* pada penggusuran lahan dalam pembangunan tol Jombang – Mojokerto konsep *civil society* yaitu kesukarelaan (*Voluntary*) kontras Surabaya biro bantuan hukum secara sukarela untuk menangani permasalahan dalam tol Jombang Mojokerto dengan cara mendampingi dan beberapa upaya yang di lakukan untuk menuntut permasalahan tol Jombang – Mojokerto yang tidak melihat unsur HAM. Hal ini senada di ungkapkan oleh koordinator kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang :

“Jadi gini mbak ya kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang adalah sebuah lembaga yang spesifik pro bunuh, jadi kita Menangani kasus –kasus masyarakat yang

free dan wajib bagi kita mbak dalam penanganan meskipun kita di minta atau tidak diminta.⁶

Konsep yang kedua yaitu kemandirian tinggi berhadapan dengan negara kontras surabaya biro bantuan hukum Jombang sebagai elemen *civil society* mempunyai kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara tanpa campur tangan dengan pemerintah, jadi biaya operasional dalam penanganan kasus tol Jombang – Mojokerto dari usaha mandiri, hal ini senada diungkapkan oleh koordinator kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang :

“Perlu mbak ketahui dana dalam pendampingan penanganan tol Jombang- Mojokerto ini berasal dari usaha mandiri yaitu kedai Perdikan mbak. dan di sini kita nyata tidak mengambil keuntungan apapun, jadi kita fokus untuk memperjuangkan hak hak rakyat yang menjadi korban pembangunan tol yang tidak melihat hak asasi manusia dan kami harus bisa mengawal sampai warga mendapatkan keadilan dalam pembangunan tol tersebut, dan masyarakat punya hak untuk sejahtera mbak”⁷

Konsep yang ketiga adalah keswadayaan (self-supporting) kontras surabaya biro bantuan hukum dalam menangani tol Jombang – Mojokerto selama ini tidak tergantung pada organisasi atau lembaga lain. Dalam karakteristik *civil society organization* yang dijelaskan oleh suharko yaitu memiliki kepedulian yang berhubungan dengan tujuan – tujuan publik, kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang memiliki kepedulian yang berhubungan dengan tujuan - tujuan publik yaitu untuk memperjuangkan hak – hak masyarakat yang tedampak tol Jombang – Mojokerto, berorientasi *civic*.

⁶ Charul Hakim, Wawancara, Mojongapit, 17 Juni 2017

⁷ Charul Hakim, Wawancara, Mojongapit, 17 Juni 2017

Kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang adalah kelompok non partisian yang berusaha berkerja untuk HAM, yaitu hak asasi warga yang terdampak tol Jombang -Mojokerto, berkaitan dengan kepentingan kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang mempertahankan kepentingan – kepentingan masyarakat yang terdampak tol Jombang – Mojokerto, tujuan agar hak-hak masyarakat terpenuhi dalam penggusuran lahan tol Jombang – Mojokerto.

Menurut Suharko, Strategi Advokasi atau disebut pendampingan bahwa strategi advokasi atau yang biasa disebut pendampingan ini merupakan strategi utama yang digunakan oleh kalangan NGO baik di Negara-negara maju maupun di Negara-negara berkembang, strategi advokasi seringkali digunakan untuk mendesakkan perubahan-perubahan sosial seperti mereformasi tata pemerintahan yang demokratis, melindungi sumber daya alam atau lingkungan, memajukan pembangunan berkelanjutan menciptakan dan memelihara perdamaian di daerah-daerah rawan konflik. Strategi advokasi akan efektif untuk memaksakan perubahan kebijakan pemerintah luar.

Strategi pendampingan /advokasi itu jika dihadapkan dengan penelitian maka kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang sudah melakukan pendampingan dengan memberikan edukasi ke warga bagaimana menyampaikan tuntutan dan pendapat di muka umum contohnya seperti dengan melakukan dialog dan kajian – kajian dengan menganalisis pasal UU no 39 TAHUN 1999 tentang hak asasi manusia. (HAM). Dan memberikan pemahaman kepada warga korban

pembangunan tol tentang bagaimana hak ekonomi, budaya, politik, melakukan investigasi secara menyeluruh secara administrasi maupun non administrasi terhadap tahapan –tahapan dalam pembangunan tol Jombang –Mojokerto, Melaporkan hasil temuan investigasi kepada komnas HAM terkait pelanggaran HAM nya, melaporkan ke ombusment terkait pelanggaran administrasi instansi atau lembaga negara penyelenggara tol yaitu BPJT.

Upaya pendampingan /advoksi guna menjaga Kesejahteraan dan hak – hak bagi warga jamaah korban pembangunan tol Jombang - Mojokerto dan kontras Surabaya biro bantuan hukum jombang sebagai wakil dari warga korban pembangunan tol Jombang – Mojokerto, warga korban jamaah pembangunan tol Jombang – Mojokerto. Upaya pendampingan di lakukan kontras surabaya biro bantuan hukum Jombang untuk menuntut kebijakan pemerintah dalam pembangunan tol Jombang – Mojokerto yang tidak melihat unsur unsur hak asasi manusia.

Menurut suharko strategi keterlibatan kritis menjelaskan bahwa kelompok atau organisasi sosial sering melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah, bahwa kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang berkerja sama dengan komisi A dan C DPRD Kabupaten Jombang pada kegiatan hearing.

B. Strategi dan bentuk gerakan masyarakat peduli agraria (GEMPAR) sebagai elemen *civil society* pada penggusuran lahan pada pembangunan tol Jombang – Mojokerto

GEMPAR salah satu aliansi gerakan bentukan organisasi perkumpulan dari kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang yang terdiri dari Women Crisis Center Jombang 3 orang, LapeksdamNU 5 orang, kontras surabaya biro bantuan hukum Jombang 3 orang, Gerakan Mahasiswa Persatuan Indonesia (GMPI) Jombang, Himpunan Mahasiswa Islam Jombang (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI), Konsorsium Mahasiswa Jombang (KMJ), BEM UNDAR.

Gerakan masyarakat peduli agraria (gempar) merupakan salah satu elemen *civil society* pada penggusuran lahan pada pembangunan tol Jombang – Mojokerto, dalam konsep *civil society* yang di jelaskan oleh AS Hikam yaitu organisasi yang tergabung dalam aliansi gempar atas dasar secara sukarela untuk memperjuangkan kepentingan - kepentingan rakyat, dan kemandirian tinggi terhadap negara, dalam aksi tersebut perangkat yang digunakan aksi hasil dari iuran setiap aliansi gempar yang tergabung, fokus hanya untuk memperjuangkan hak rakyat dalam pembangunan tol Jombang – Mojokerto tanpa mencari keuntungan hal ini senada diungkapkan oleh LakpesdamNU dan Women Crisis Center :

LakpesdamNU :

“Lakpesdam dananya dari kerja sama program – program dengan lembaga -lembaga luar negeri yang di atur dalam kesepakatan negara-negara sedunia(PBB) serta usaha lembaga ternak,sawah,milik lakpesdam dan kerjasama usaha dengan kelompok komunitas di Desa dan Kota sedangkan aliansi Gempar pendananya swadaya dari lembaga dan organisasi mahasiswa serta kelompok petani yang tergabung di dalamnya⁸

Women Crisis Center:

⁸ Abdul Wahab, wawancara, Kaliwungu 5 Juni 2017

“Kalau Women Crisis Center dapat dari donatur luar negeri sedangkan gempar iuran dari lembaga -lembaga yang beralias dalam gempar”⁹

Jika di hadapkan dengan konsep civil society oleh suharko yaitu berorientasi isu maka gempar adalah gerakan yang mucul karena melihat isu - isu pembangunan-pembangunan di Jombang yang tidak melihat dampak kerugianya terutama pada tol Jombang -Mojokerto, gerakan masyarakat peduli agraria bahwa gerakan ini menuntut kebijakan pemerintah dalam proses pelaksanaan pembangunan insftraktruktur di Jombang yang seharusnya melihat unsur -unsur kerugian.

upaya strategi gerakan aliansi masyarakat peduli agraria (GEMPAR) yaitu mengumpulkan data dan fakta yang ada pada pembangunan tol Jombang – Mojokerto, gempar melihat dari fenomena fenomena isu terhangat yaitu semen kendeng di Jawa Tengah, berangkat dari fenomena tersebut gempar memutuskan untuk melakukan bedah film dengan tema film samin vs semen gempar melakukan dialog dan berdialektika tentang film documenter samin vs semen dengan berangkat dari film documenter samin vs samin, kontras Surabaya biro bantuan hukum Jombang mengajak gempar untuk melihat fenomena yang ada di Jombang tentang agraria di Jombang, terutama dampak negatif dari pembangunan tol Jombang – Mojokerto. Gempar sangat antusias dengan dan tergugah, hari senin melakukan diskusi - diskusi terkait tentang pembangunan tol Jombang -Mojokerto dan agraria di Jombang.

⁹ Palupi, wawancara. Cokroaminoto 5 juni 2017

Setelah diskusi-dikusi gempar melakukan aksi taktis dengan membentuk kepanitiaan Aksi Gempar yaitu charul hakim sebagai koordinator GEMPAR, sekertaris dan bendahara dari pihak Women crisis center novi, korordinator lapangan nya (korlap aksi) yaitu sadans dari GMNI, dan humas dari beberapa organisasi yang tergabung aliansi tersebut GMPI, BEM UNDAR, KMJ, dengan dinamika dan dialektika dari & beberapa organisasi tersebut memutuskan untuk melakukan aksi yang di beri nama (GEMPAR).

Jika dihadapkan dengan karakteristik gerakan sosial menurut sidnew torrow yaitu tantangan kolektif, gerakan masyarakat peduli agraria melakukan sasaran aksi di mulai pukul 08.00 sampai jam 11.45 di mulai dari kampus Undar Jombang berhenti di ringin contong, dengan menggunakan Perangkat Aksi 1 mobil komando & pengeras suara, 2 bendera merah putih, 10 atribut bendera masing-masing aliansi, 10 Poster Tuntutan, 3 megaphon, 1000 lembar Selebaran statemen. 50 selebaran Pers release jam 09.00 masa aksi sampai di titik ringin contong, yang ke dua karakteristik gerakan sosial menurut sidenew torrow yaitu tujuan bersama yaitu gerakan aliansi masyarakat peduli agraria menggalang solidaritas dan tanda tangan masyarakat untuk menolak. Aliansi Gerakan Masyarkat Pedulu Agraria Jombang Menuntut penggusuran lahan dalam pembangunan tol Jombang -Mojokerto yang tidak melihat unsur unsur hak asasi pada manusia dalam proses ganti rugi lahan, dan sasaran aksi dilanjutkan menuju gedung DPRD Jombang, yang ke tiga solidaritas dan tantangan kolektif, GEMPAR terdiri dari beberapa organisasi yang sukerela

untuk memperjuangkan kepentingan –kepentingan rakyat yang tertindas hak asasi manusianya oleh pemerintah, terutama yang terdampak dalam pembangunan tol Jombang –Mojokerto, rasa solidaritas dari beberapa organisasi yang mempunyai petimbangan strategis untuk yang diperjuangkan, hal ini senada diungkapkan oleh salah satu dari anggota Gempar :

LapeksdamNU Jombang :

" Alasan saya ikut aliansi GEMPAR adalah mengacu pada muktamar 33 NU Bahwa pengunaan alih fungsi lahan produktif kharam dan pemerintah itu jangan semenea – mena menyakiti rakyat secara psikis, ekonomi¹⁰

Tidak hanya lapeksdamNU dari Himpunan Mahasiswa Islam Jombang (HMI) dan Women Crisis Center hal ini senada diungkapkan oleh salah satu dari

Himpunan Mahasiswa Islam Jombang (HMI):

"Sebagai mahasiswa kita menjadi agen of control dari kebijakan – kebijakan pemerintah, pemerintah yang pro rakyat dan yang kontra terhadap rakyat atau kebijakan yang menyeleweng contohnya pembangunan tol Jombang –Mojokerto itu mbak yang tidak melihat hak hak masyarakat yang terdampak¹¹

Women Crisis Center :

“Jadi Women crisis center terlibat dalam isu gempar , jadi women crisis center itu melihat dari analisa gendernya selama dampak dari pembangunan tol itu ada perempuan yang terdampak, bukan kaum laki laki saja kan women crisis center mengawal isu tersebut melihat sejauhmana mana sih dampak dari pembangunan tol pada perempuan, kan selama ini perempuan identik mengelola rumah, mengelola sumber daya, perempuan menjadi petani, dari pembangunan tol tersebut perempuan dirugikan karena ganti rugi sawahnya tidak di ganti otomatis perempuan tersebut menjadi pengangguran, dan kerugian dari segi immaterial mbak kan sangat di sayangkan mbak dari pihak perempuan kan peremupan butuh kebutuhan yang

¹⁰ Abdul Wahab, wawancara, Kaliwungu 5 Juni 2017

¹¹ Rosi, wawancara, Jombang 5 juni 2017

sepantasnya, dan kita juga berkomitmen untuk mengawal hak-hak masyarakat yang terdampak to Jombang-Mojokerto¹²

Jika dikaitkan pada tipologi gerakan sosial dalam penelitian ini gerakan masyarakat peduli agraria termasuk gerakan sosial khusus (*Specific social Movement*) gerakan masyarakat peduli agraria memilih arah yang jelas untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terkena dampak korban pembangunan tol Jombang-Mojokerto dan lebih fokus ke agraria, dalam hal ini ganti rugi lahan yang telah digusur apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Sedangkan berdasarkan tujuannya gerakan masyarakat peduli agraria termasuk tipe *Reform Movement* (Gerakan reformasi) jadi gerakan masyarakat peduli agraria ditujukan untuk mengoreksi atau memperbaiki kebijakan pemerintah dalam pembangunan tol Jombang-Mojokerto yang melihat unsur-unsur hak-hak masyarakat yang terhadap pembangunan tol Jombang-Mojokerto. Hal ini senada diungkapkan oleh koordinator Gempar :

"Melihat masyarakat sebagai instrument, ketika pemerintah masih melihat masyarakat sebagai instrument / penghadang penghalang dalam pembangunan, gempar akan tetap muncul dipelopori oleh kontas Surabaya biro bantuan hukum Jombang, untuk menggalakkan perlawanan terhadap apa terhadap pembangunan yang tidak melihat manusia seutuhnya karena itu jelas - jelas melanggar HAM gitu"¹³

¹² Palupi, wawancara. Cokroaminoto 5 juni 2017

¹³ Koordinator Gempar, Charul Hakim, Wawancara, Mojongapit, 17 Juni 2017